

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari salah satu perwakilan pusat di setiap daerah mempunyai peranan penting khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan pemerintah daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah yang disebut dengan otonomi daerah dimana pemerintah pusat menyerahkan sebagian kuasanya ke pemerintah daerah berdasarkan hal otonom (Maulina et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2021 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014), menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah desentralisasi.

Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab. Otonomi nyata berarti bahwa penanganan urusan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang secara konkretnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, berkembang, dan beradaptasi sesuai dengan potensi serta karakteristik daerah tersebut. Sedangkan otonomi yang bertanggungjawab mengacu pada penyelenggaraan otonomi yang harus

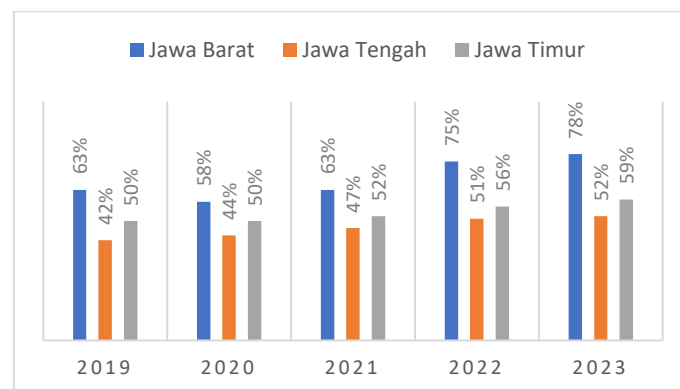
sesuai dengan tujuan pemberian otonom yaitu untuk memperdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan nasional.

Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat. Melainkan pemerintah daerah harus proaktif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kebijakan yang tidak lagi “given” dan “uniform” ini berarti bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak harus selalu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan daerah (Zahroh & Salisa, 2017).

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, sering kali muncul berbagai masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu fenomena yang umum terjadi di Indonesia adalah kecenderungan pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah. Ketergantungan ini mengakibatkan peningkatan ketergantungan fiskal, dimana semakin besar dana transfer pusat yang diterima, semakin rendah kemandirian keuangan daerah. Kondisi tersebut memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah karena menunjukkan ketidak mampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu hal

ini mencerminkan kurangnya optimalisasi sumber daya dan potensi lokal yang dimiliki pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fenomena yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang cenderung bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, meskipun rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi ini meningkat setiap tahun. Namun, masih terdapat beberapa kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian yang rendah. Ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer ini dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, karena daerah menjadi kurang fleksibel dalam mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kemandirian keuangan, seperti mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki tata kelola keuangan, guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.



Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id* (data diolah, 2025)

Gambar 1. 1

Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rasio yang relatif rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Pada periode 2019-2023, rasio kemandirian keuangan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur konsisten berada diatas 50% dengan rata-rata masing-masing sebesar 67% dan 53%, yang masuk dalam kategori sedang. Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah, rasio kemandirian keuangan pada tahun 2019 sebesar 42%, naik menjadi 44% pada tahun 2020, 47% pada tahun 2021, dan mencapai kategori sedang dengan presentase 51% pada 2022 hingga meningkat lagi menjadi 52% pada 2023. Meskipun terdapat fluktuasi, rata-rata rasio selama periode tersebut adalah 47%. Walaupun berada dalam kategori sedang, terdapat tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kinerja keuangan di tingkat Kabupaten/Kota.

Salah satu tugas paling penting yang harus diselesaikan oleh setiap daerah di Indonesia adalah pengelolaan keuangan. Keberhasilan kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada bagaimana kemandirian pada keuangan daerah yang dikelola. Pencapaian dalam pembangunan dan pelaksanaan pemerintah daerah akan terwujud melalui pengelolaan keuangan yang baik dan optimal, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini menjadi masalah yang menarik untuk diteleti. Dimana otonomi daerah menimbulkan permasalahan terkait pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti ketidaksiapan pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi harapan pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah. Permasalahan keuangan menjadi sangat penting karena dapat menghambat pembangunan di tingkat daerah. Dalam proses pembangunan, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dana dari pendapatan asli daerah, tetapi juga menerima dana transfer dari pemerintah pusat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini berfokus pada tiga variabel: ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan tingkat ketergantungan keuangan daerah.

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin besar pula kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional dan pemerintahan. Sebaliknya, jika ukuran pemerintah daerah kecil, pelaksanaan operasional dan pemerintahan cenderung menghadapi lebih banyak kesulitan, karena ukuran yang lebih besar dapat mendukung kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (A. Aziz, 2016).

Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dari total aset yang di miliki oleh pemerintah daerah. Ukuran pemerintah yang lebih besar memberikan peluang luas bagi pemerintah daerah untuk mengeksplorasi potensi daerahnya

sebagai sumber pendapatan asli daerah. Besar ukuran pemerintah daerah seharusnya dimanfaatkan untuk pengadaan aset, dimana aset daerah memiliki kaitan erat dengan belanja daerah, terutama belanja modal terkait dengan pengadaan infrastruktur. Penelitian pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahroh & Salisa, (2017) bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christina, (2016). Artinya ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan A. A. Aziz & Kusumawati, (2024) menemukan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menurutnya hal ini menandakan total aset pemerintah daerah belum sepenuhnya di manfaatkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengoptimalisasi program-program pemerintah dan operasionalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan lain. Hal ini menekankan pentingnya strategi pengelolaan aset yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu fokus tidak hanya pada ukuran aset-aset ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan potensi pertumbuhan nilai aset dimasa depan, seperti investasi infrastuktur, yang mungkin membutuhkan waktu untuk menunjukan dampak positif pada kinerja keuangan. Oleh karena itu penting untuk memahami bahwa beberapa aset mungkin menghasilkan manfaat dalam jangka panjang.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun (2010), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal juga dapat menjadi salah satu ukuran perencanaan yang baik, dengan cara melihat alokasi APBD yang diberikan untuk perbaikan maupun pembangunan sarana dan prasarana masyarakat.

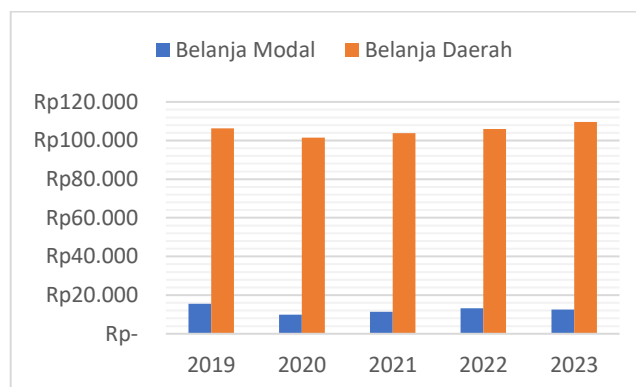
Pengalokasian dana yang lebih besar pada belanja modal dapat membantu daerah dalam memperoleh sumber keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan berdampak naik pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Prastiwi & Aji, 2020).

Menurut Siregar, (2015) belanja modal diartikan sebagai pengeluaran untuk pengadaan aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta aset tetap lainnya. Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas, aset-aset tersebut juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam realitanya, masih terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase belanja modal yang relatif kecil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti bahwa rata-rata belanja modal pemerintah daerah hanya mencapai 19% dari total anggaran belanja daerah sebesar RP. 1.153 triliun, sekitar 36% atau Rp. 310,6 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara belanja barang dan jasa sebesar 23% atau Rp. 270,6 triliun, dan belanja modal hanya 19% dari total anggaran belanja daerah. Menanggapi hal ini Sri Mulyani menyatakan bahwa gaji di daerah terlalu besar

dan menekankan bahwa setidaknya 26% dari dana transfer umum berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil harus digunkan untuk belanja daerah belanja infrastruktur (Michael Widowati, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur publik dan pemanfaatan aset daerah belum optimal. Lathifa & Haryanto, (2019) mengatakan permasalahan tersebut terjadi karena pemerintah daerah kurang memaksimalkan panggilan potensi-potensi pendapatan asli daerah.

Menteri Dalam Negeri Titi Karnavian juga angkat bicara dalam acara Musyawarah Persatuan Pembangunan Nasional 2021, bahwa masih ada beberapa daerah mengalokasikan belanja modal dalam jumlah yang relatif kecil yang berkisar sekitar 12%, sedangkan hampir sebesar 70% dan bahkan di beberapa daerah hampir mencapai 80% dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja pegawai. belanja operasi masih mendominasi total belanja di beberapa daerah sedangkan belanja modal masih belum ideal dan masih dikatakan terendah diantara belanja daerah lainnya. Untuk lebih jelasnya, perbandingan realisasi belanja modal terhadap belanja daerah di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id* (data diolah, 2025)

Gambar 1. 2

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

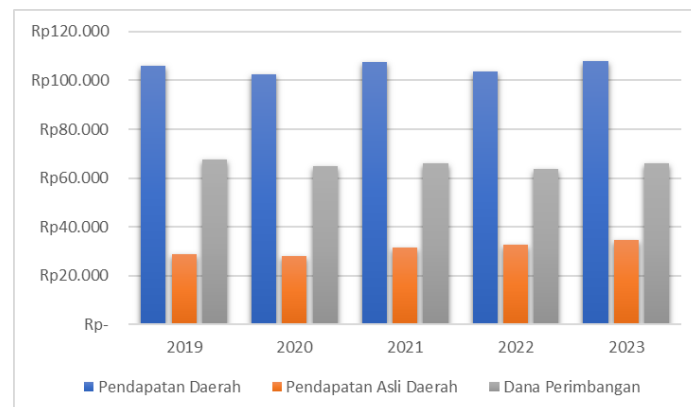
Gambar 1.2 terlihat bahwa alokasi belanja modal di pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah masih terbilang rendah. Secara persentase, alokasi belanja modal hanya berkisaran antara 16 persen pada tahun 2020 sampai 10 persen pada tahun 2021-2023. Meningkatnya belanja modal, akan berpengaruh pada bertambahnya aset daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan. Penelitian pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lathifa & Haryanto, (2019) dan Digdowiseiso et al., (2022) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fernandes & Putri, (2022) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurutnya belanja modal yang dialokasi oleh pemerintah belum berhasil menarik minat publik untuk

berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu, realisasi belanja modal yang cenderung lambat dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai daerah mengakibatkan belanja modal belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah tingkat ketergantungan keuangan daerah. Tingkat ketergantungan daerah yaitu kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat memiliki kinerja keuangan yang rendah karena pemerintah daerah tidak mengontrol penuh anggarannya. Oleh karena itu, meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menteri keuangan Sri Mulyana mengatakan bahwa saat ini pendanaan pembangunan daerah masih bergantung pada alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TTKD) dari pemerintah pusat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbilang sangat kecil. Dimana alokasi TTKD mencapai 65%, sementara PAD yang berkontribusi sekitar 23% dan pendapatan lainnya 8,3%. Selain itu daerah masih membutuhkan financing atau pembiayaan (BPKAD, 2021)



Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id* (data diolah, 2025)

Gambar 1. 3

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2019, PAD Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp28.648,04 miliar, menurun pada tahun 2020 menjadi Rp28.056,37 miliar. Pada tahun 2021, PAD mengalami peningkatan menjadi Rp31.611,2 miliar, dan terus meningkat hingga mencapai Rp34.421,17 miliar pada tahun 2023. Di sisi lain, Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari pemerintah pusat menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya dan mencapai Rp66.039,29 miliar pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari pemerintah pusat terhadap pembiayaan di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih sangat besar. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Rendahnya kontribusi PAD dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mandiri dalam mengelola keuangan.

Yang menyebabkan terjadinya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah adanya perbedaan pemahaman dalam fungsinya. Tujuan pemerintah pusat memberikan dana transfer ke pemerintah daerah untuk pemerataan keuangan daerah. Sedangkan pemerintah daerah beranggapan bahwa dana transfer tersebut adalah pemberian dana untuk mencukupi segala kebutuhan daerah. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat terlihat dari besarnya dana perimbangan atau dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah juga dapat menurun apabila penggunaan pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah juga harus bisa mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan, supaya dapat meminimalkan ketergantungan keuangan tersebut pada pemerintah pusat. Tetapi pada kenyataannya walaupun pendapatan daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah didominasi dengan dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat dan mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya, kinerja keuangan pemerintah daerah masih di nilai belum baik. Penelitian pengaruh tingkat keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiani & Ismunawan, (2022) dan Anggara & Cheisviyanny, (2020) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya peneliti yang dilakukan oleh Aulia & Rahmawaty, (2020) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menurutnya tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang diproksikan melalui dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dimanfaatkan secara optimal. Karena dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagian besar dipakai untuk belanja rutin aparatur daerah yang mengakibatkan tidak tersedianya dana untuk pelayanan publik dan menyebabkan ketidakefektifan penggunaan dana perimbangan. Oleh karena itu, tingkat ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Fenomena ini menarik untuk diteliti, karena fluktuasi rasio keuangan pemerintah daerah menjadi aspek paling penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus terus berupaya memaksimalkan potensi sumber daya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan yang baik guna mencapai kinerja keuangan yang optimal. Selain itu, terciptanya kemandirian keuangan daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah secara simultan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal secara parsial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah secara parsial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah secara simultan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal secara parsial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah secara parsial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, serta menjadi referensi dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui analisis rasio keuangan, khususnya dalam mengkaji topik-topik terkait permasalahan yang di bahas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Akuntansi Sektor Publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan melalui analisis kasus-kasus nyata, yang dipelajari dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta menjadi sumber informasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam mempertimbangkan kebijakan di setiap wilayah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dengan mengambil data keuangan pada halaman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat *website* djpk.kemenkeu.go.id dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan alamat *website* bpk.go.id

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini terhitung dari bulan September 2024 sampai dengan bulan April 2025. Rincian waktu penelitian disajikan dalam matrik pada lampiran 1.